

ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP INFLASI DI PULAU JAWA

Yustirania Septiani, Azril Arrasyd*, Muhammad Fakhriy Wafiy,
dan Naufal Hana Alfian

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

*Corresponding Email: azrilarrasyid998@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the extent to which fiscal decentralization and regional retribution affect the inflation rate in the provinces of Banten, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, and East Java. The research can serve as a reference for the government in managing fiscal decentralization funds (DBH, DAU, and DAK) as well as regional retribution. The researchers used a quantitative approach and the method employed in this study is multiple linear regression using the Fixed Effect Model (FEM). The results show that the ratio of DBH to inflation has a negative effect on inflation in the provinces of Banten, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, and East Java. The ratio of DAU to inflation also has a negative effect, the ratio of DBH to inflation has a negative effect, and regional retribution has a positive but insignificant effect on inflation. The study examines the extent of the effect of fiscal decentralization funds (DBH, DAU, and DAK) and regional retribution on inflation in the provinces of Java Island, namely Banten, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, and East Java, excluding DKI Jakarta. This is because the fiscal gap in general allocation funds in DKI Jakarta is covered by regional income, so there is no transfer of central income to DKI Jakarta in the form of general allocation funds.

Keywords: Inflation, Fiscal Decentralization, and Regional Retribution.

 <https://doi.org/10.14710/djoe.45160>



[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Salah satu hal utama dari integrasi antara pempus dengan pemda tercermin pada otonomi daerah. Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat ke pemda dalam otonomi selalu diikuti dengan transfer dana (*money follow functions*). Pelimpahan belanja (*expenditure assignment*) merupakan bagian dari konsekuensi pelimpahan wewenang dan menjadi kewajiban layanan publik yang pastinya perlu didukung melalui pelimpahan pendapatan (*revenue assignment*). Transfer dana dari pempus ke pemda pada umumnya dikatakan sebagai desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal suatu alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis (Christia & Ispriyarso, 2019). Desentralisasi tersebut dapat berkaitan dengan kewajiban dan wewenang pemda untuk menyediakan barang serta jasa publik (*public goods / public service*). Fungsi adanya desentralisasi ini yaitu agar terpenuhinya usulan daerah yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber fiskal negara, meningkatkan keterbukaan serta transparannya pemda, mendorong dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah, meminimalisir kesenjangan antara daerah satu dengan yang lain, terjaminnya pelayanan masyarakat di daerah, dan diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

d Taqwa et al., (2016) pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan atas azas otonomi desentralisasi, dekonsentrasi, Instansi Vertikal dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan strategi yang tepat dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang belajar dan mengembangkan demokrasi diberbagai segi. Pada dasarnya desentralisasi fiskal pada suatu daerah dapat memiliki dampak positif maupun negatif pada peningkatan ekonomi, kondisi ini bergantung kepada kemantapan sistem instransi pemda tersebut ketika melaksanakan kegiatan atau instruksi yang berkaitan dengan pendelegasian fiskal.

Otonomi daerah merupakan kemandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah, kemandirian disini adalah kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Kurniawan, 2018). Oleh karena itu, pelaksanaan otonomi daerah hendaknya mendorong dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, dan ekonomi masyarakat. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan ketidakstabilan pada ekonomi secara makro adalah inflasi. Inflasi merupakan kondisi ekonomi suatu negara dengan adanya potensi meningkatnya harga-harga dan jasa pada jangka yang panjang. Dalam KKBI, inflasi didefinisikan sebagai menurunnya nominal uang (kertas) yang disebabkan terdapat banyak dan cepatnya peredaran uang yang memiliki dampak pada meningkatkannya harag barang dan jasa.

Salah satu faktor bertambahnya jumlah uang beredar (JUB) yang menyebabkan inflasi yaitu besarnya pengeluaran pemerintah. Bentuk pengeluaran pemerintah ini termasuk pendelegasian keuangan. Adanya tranfer keuangan dari pempus, maka pemerintah daerah akan menggunakan dananya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pengeluaran pemerintah akan menyebabkan uang di masyarakat menjadi naik yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi.

Secara teoritis, pelimpahan fiskal berpengaruh pada inflasi yang dapat dijabarkan melalui kurva permintaan agregat (*aggregate demand*). Permintaan agregat yaitu total belanja yang dilaksanahn oleh pemerintah, rumah tangga, dan Perusahaan pada perekonomian suatu negara. Total tersebut menjelaskan keseluruhan output riil yang dibeli dalam tingkatan harga barang. Semakin besar permintaan agregat, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya inflasi pada daerah tersebut (Putri, 2009).

Selain desentralisasi fiskal, kestabilan harga barang juga dapat dipengaruhi oleh adanya retribusi daerah. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2018). Penerimaan retribusi ini meningkat yang disebabkan besarnya pembayaran retribusi dari masyarakat atau pengguna jasa atau fasilitas yang disediakan. Pemaksaan ini memiliki sifat ekonomis yang disebabkan

adanya masyarakat atau konsumen yang telah menerima manfaat atas penggunaan jasanya yang dikenai dengan iuran. Semakin besar pembayaran retribusi oleh masyarakat, maka dapat berdampak pada menurunnya jumlah uang yang dipegang masyarakat (JUB) yang dapat mempengaruhi laju inflasi daerah tersebut.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan pada harga barang maupun jasa pada umumnya dengan periode tertentu. Oleh karena itu, dalam pengukuran berubahnya laju inflasi (*inflation rate*) dari masa ke masa secara umum dapat menggunakan suatu indikator yang biasanya dinamakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Nominal ini dilakukan melalui perhitungan beberapa barang maupun jasa yang dapat dilakukan untuk perhitungan tinggi rendahnya nilai laju inflasi. Laju inflasi yang biasanya diketahui masyarakat merupakan laju inflasi yang digunakan dalam perhitungan untuk mengetahui berubahnya harga barang maupun jasa yang digunakan pada kegiatan konsumsi masyarakat. Nilai indikator ini diketahui melalui perhitungan secara berkala serta biasanya dijalankan dalam waktu bulanan, kuartalan, dan tahunan.

Tingkat inflasi yang tinggi dapat merugikan bagi semua kalangan. Adanya inflasi, maka tingkatan nilai uang mengecil atau menurun. Adanya penurunan nilai pada nominal uang dapat berdampak pada kesanggupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya berupa barang dan jasa dapat berkurang. Laju inflasi tak terkendali dapat menghambat aktivitas dunia usaha, sulitnya mengajak masyarakat dalam menabung serta berinvestasi, terjadinya hambatan pemetaan pembangunan oleh pemerintah, merusak bentuk APBN dan APBD yang berdampak pada tidak kondusifnya bagi perekonomian secara keseluruhan. Maka dari itu, diperlukan adanya suatu langkah dalam mengendalikan laju inflasi. Karena dengan stabilnya inflasi, maka roda perekonomian dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

Tabel 1. Data Realisasi Transfer Anggaran Pemerintah Pusat ke Pemda

Provinsi	Realisasi Transfer Pusat ke Daerah (milyar)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Banten	4.273,90	4.416,39	4.609,54	3.079,81	3.285,07
Jawa Barat	14.821,58	15.916,33	16.598,22	10.119,27	10.748,01
Jawa Tengah	11.551,51	11.712,28	11.892,47	7.921,18	8.353,83
Jawa Timur	14.166,87	13.914,54	15.219,08	11.407,26	11.437,01
Yogyakarta	3.651,91	3.761,04	3.836,51	3.336,12	3.480,48

Sumber: DJPK, 2023

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada jangka empat tahun terakhir (2020 – 2023) menunjukkan cenderung masih terkonsentrasi di pulau Jawa, dimana sering disebut dengan *Jawa Sentris*. Fenomena ini dapat dilihat melalui sejumlah faktor-faktor yang saling terkait, mencakup aspek sejarah, politik, ekonomi, dan demografi. Pertama-tama, Pulau Jawa memiliki Sejarah yang Panjang sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi di Indonesia. Sejak zaman kolonial hingga masa kini, pusat pemerintahan, pusat ekonomi, pusat perdagangan, pusat ibu kota dan pusat pengambilan keputusan kebijakan lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa.

Pembangunan yang bersifat *Jawa Sentris* ini menjadi sebuah perbincangan dan menimbulkan berbagai respons serta interpretasi di semua kalangan. Dimana dari awal kemerdekaan hingga sekarang masih terpusat di Pulau Jawa melihat luasan wilayah Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke. Hal itu dapat dilihat dari anggaran dana dari pusat melalui dana perimbangan yang diserahkan pada pemrov di pulau Jawa selalu meningkat pada setiap tahunnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir

daripada daerah provinsi lainnya. Besarnya dana perimbangan atau transfer ke daerah inilah yang menjadi salah satu sebab majunya daerah di Pulau Jawa. Meskipun peningkatan alokasi dana ke pulau Jawa memiliki dampak yang baik terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan penduduk, tetapi peningkatan alokasi dana tersebut menyebabkan jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat terutama di daerah Provinsi di Pulau Jawa. Peningkatan jumlah uang beredar ini tentunya dapat menyebabkan inflasi harga barang atau jasa. Hal tersebut yang mendorong besarnya inflasi di wilayah Pulau Jawa.

Tabel 2. Data PDRB Tahun 2021

Peringkat	Nama Wilayah (Per Pulau)	PDRB Nominal 2021 (Triliun Rupiah)
1	Jawa	9.814,99
2	Sumatera	3.679,16
3	Kalimantan	1.399,73
4	Sulawesi	1.168,12
5	Nusa Tenggara	470,84
6	Papua	320,42
7	Bali	219,8
8	Maluku	100,92

Sumber: ITB (diolah), 2022

Dari data diatas dapat dijelaskan jika Pulau Jawa yaitu pulau yang memiliki perekonomian terbesar di Indonesia. Bahkan jika perekonomian pulau lain digabungkan, besarnya masih dibawah perekonomian Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Hal tersebut disebabkan terpusatnya seluruh kegiatan di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa bahkan jauh masif jika dikomparasikan dengan pulau lainnya. Maka dari itu, ketimpangan ini akan menjadi besar jika terus terjadi.

Dari penjelasan diatas, peneliti memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian pengaruh desentralisasi fiskal dan retribusi daerah terhadap inflasi di Pulau Jawa pada beberapa tahun terakhir. Maka dari itu, timbul beberapa pertanyaan yaitu seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal pada laju inflasi di Pulau Jawa, bagaimana pengaruh retribusi daerah pada laju inflasi di Pulau Jawa, serta bagaimana cara mengendalikan inflasi melalui pengelolaan desentralisasi fiskal dan retribusi daerah. Terdapat beberapa tujuan peneliti melakukan penelitian ini antara lain untuk menjelaskan besarnya pengaruh desentralisasi fiskal pada laju inflasi di Pulau Jawa dan pengaruh retribusi daerah terhadap laju inflasi di Pulau Jawa, dan untuk mengetahui cara mengendalikan inflasi melalui pengelolaan desentralisasi fiskal dan retribusi daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Teori Perspektif Baru (*New Perspective Theory*) menyatakan jika pelimpahan keuangan digunakan untuk memperbaiki efektifitas dan mengurangi ketimpangan antar daerah dan meningkatkan perekonomiann suatu daerah. Pendelegasian fiskal dipercaya berpengaruh pada efektifias dalam pengeluaran publik pemda dan menjadi suatu langkah baik dalam meminimalisir rusaknya rencana pempus. Pelimpahan keuangan dapat dikatakan menjadi sebuah cara untuk meningkatkan perekonomian (*engine of economic growth*). Di Asia Timur, Langkah tersebut telah dilaksanakan di

seluruh negara (Amin, 2016). Desentralisasi fiskal dalam arti luas pada belanja publik dapat berdampak pada ekonomi secara makro. Adanya perubahan pada bagian belanja publik pada anggaran yang telah disusun oleh pemda dapat berpengaruh pada permintaan agregat dan kestabilan, contohnya apabila terdapat kenaikan belanja pemda secara relatif maka akan berpengaruh pada permintaan agregat di tingkat daerah, bertambahnya permintaan agregat dapat meningkatkan perekonomian dan pada akhirnya berdampak pada tingkat inflasi.

Zulkipli (2017) menyebutkan jika desentralisasi terdapat berbagai macam dimensi antara lain desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu langkah yang dilakukan negara untuk mengontrol bidang public yang menggambarkan sejarah, geografi, kestabilan politik, fungsi politik, dan karakteristik lainnya yang memiliki perbedaan. Berdasarkan pendapat Tiebout (1956) dan Klugman (1994), pendelegasian fiskal berawal dari kelebihan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dibandingkan pengetahuan Masyarakat yang mengharuskan pemda perlu menyediakan layanan jasa dan barang publik yang harus dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat (Khamdana, 2016).

Terdapat teori berkaitan dengan retribusi daerah yaitu teori Keynes, yang menjadi landasan pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian. Menurut Keynes pemerintah perlu memberikan keputusan yang dapat meningkatkan ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah dan mengurangi pajak (retribusi) yang berdampak pada efek multiplier melalui stimulasi tambahan permintaan pada konsumsi rumah tangga. Artinya bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan pajak atau retribusi guna mengelola permintaan akan barang yang berpengaruh terhadap tingkat harga (inflasi) (Rakanita & Sasana, 2011).

Pada penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Baskaran (2012) yang berjudul *Revenue decentralization and inflation: A re-evaluation* mendapatkan hasil bahwa ketika perubahan tersebut diperhitungkan, RD mempunyai pengaruh yang signifikan dampak negatif terhadap inflasi. Kemudian pada 2017 Appirachman melakukan penelitian dampak desentralisasi fiskal pada inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap inflasi.

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukannya menghasilkan bahwa signifikansi 95 % diketahui jika DAK terhadap APBD berdampak negatif pada inflasi di NTB artinya jika DAK meningkat satu satuan berdampak pada inflasi di NTB yang menurun sebesar 0,1290144 satuan . DAU pada APBD berpengaruh positif terhadap inflasi di NTB yang ditunjukkan koefisien sebesar 0.5825204, DBH terhadap APBD berdampak positif terhadap inflasi sebesar 0,4592334 dan retribusi berdampak negatif dan signifikan terhadap inflasi di NTB yang memiliki koefisien sebesar 0,0003764. Selain penelitian terdahulu tentang desentralisasi, terdapat juga penelitian terdahulu mengenai retribusi daerah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darwin Damanik dan Pawan Darasa Panjaitan tentang pengaruh retribusi daerah di pematang

siantar menghasilkan bahwa secara parsial retribusi memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi di Kota Pemantang Siantar.

METODE PENELITIAN

Di penelitian ini, peneliti memakai desain penelitian deskriptif kuantitatif.. Tipe data yaitu data panel dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*. Cakupan data yang dipilih yaitu dengan rentang waktu antara 2020 sampai 2023 yang meliputi lima provinsi di Pulau Jawa. Data penelitian yaitu data sekunder yang diambil berdasarkan data DJPK dan Badan Pusat Statistika (BPS). Variabel yang digunakan ada dua yaitu variabel *independent* meliputi DAU, DAK, DBH, dan retribusi daerah dan variabel *dependent* yaitu inflasi. Teknik analisis deskriptif yang data analisis diperoleh dari perhitungan regresi. Analisis deskriptif pada penelitian yaitu berupa data-data, tabel, dan grafik. Selanjutnya akan dilakukan analisis juga menggunakan asumsi klasik.

$$\text{Inflasi} = \beta_1 + \beta_2.DBH + \beta_3.DAU + \beta_4.DAK + \beta_5.Retrtribusi + \varepsilon_1 \quad (1)$$

keterangan

DBH	: Dana Bagi Hasil
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
Retribusi	: Retribusi

Menurut Widarjono, (2018), data panel memiliki beberapa keunggulan. Keuntungan pertama adalah adanya peningkatan dalam jumlah *degree of freedom*, karena data bertipe panel yaitu campuran data *cross section* serta data *time series*. Hal ini disebabkan oleh penambahan data yang terkumpul, yang berdampak pada peningkatan *degree of freedom*. Selanjutnya data panel juga digunakan untuk mengatasi beberapa masalah yang muncul, seperti keberadaan variabel yang terabaikan (*omitted variable*). Data panel campuran data *time series* dan *cross-section* dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Ghozali (2018), bahwa terdapat tiga jenis model pendekatan yang dapat dilakukan pada pengujian analisis terhadap model regresi data panel, di antaranya:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Tipe ini mengintegrasikan data panel dengan mencampur *time series* dan informasi *cross-section* tanpa menggabungkan dimensi waktu dan individu yang terpisah. Data tetap konsisten di seluruh rentang waktu. Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) diterapkan dalam penghitungan data panel dalam tipe ini.

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode yang mengasumsikan perbedaan antar variabel *intercept*. Estimasi data panel pada model ini melalui penggunaan cara variabel *dummy* yang digunakan dalam mengetahui *intercept*. Model tersebut dikenal sebagai *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM)

Model REM menghitung *data panel* melalui memperhitungkan kemungkinan adanya hubungan antara waktu dan variabel. Asumsinya adalah setiap variabel

memiliki perbedaan *intercept* secara acak atau random. Kelebihan model ini termasuk eliminasi heteroskedastisitas, atau istilah lainnya yaitu *Error Component Model* (ECM) atau *Generalized Least Square* (GLS).

Pada pemilihan metode estimasi yang terbaik, ada tahap pengujian yang harus dilaksanakan, yaitu:

a) Uji *Chow*

Uji *chow* merupakan uji yang dilakukan dalam memilih model yang lebih sesuai atau cocok antara CEM atau FEM. Hipotesis uji *chow* yaitu antara lain:

H_0 : CEM (pooled OLS)

H_1 : FEM (LSDV)

Kesetaraan *intercept*, yang merupakan hipotesis nol yang diajukan di pengujian ini, menunjukkan bahwa CEM merupakan tipe yang sesuai dalam mengolah data berjenis panel. Di sisi lain, hipotesis alternatif mengusulkan *intercept* yang tidak sama, yang menunjukkan bahwa FEM merupakan tipe terbaik dalam regresi data dengan jenis panel. Dengan m derajat kebebasan sebagai pembilang dan $n-k$ sebagai penyebut, nilai statistik F yang dihitung melalui distribusi statistik F dengan benar. Di sini, M sama dengan jumlah individu dikurangi satu dan menunjukkan jumlah batasan pada model tanpa variabel *dummy*. N adalah total observasi, dan k merupakan total variabel dan membentuk indikator model efek tetap.

Mengalikan jumlah orang dengan jumlah periode akan menghasilkan jumlah observasi (n). Jumlah orang ditambah jumlah variabel menghasilkan jumlah parameter (k) dalam model efek tetap. FEM adalah model terbaik dalam regresi data berjenis panel jika nilai F yang diestimasi melebihi nilai F kritis, yang berakibat pada penolakan hipotesis nol. Sedangkan jika angka F hitung lebih kecil dari nilai F kritis, oleh karena itu hipotesis nol terima, yang mengindikasikan bahwa model *common effect* (CEM) yaitu model yang terbaik dalam analisis regresi data berjenis panel (Widarjono, 2018).

b) Uji *Hausman*

Pengaplikasian Uji *Hausman* yaitu demi membantu dalam membandingkan antara *Random Effect Model* (REM) dan model *fixed effect* (FEM) untuk menentukan mana yang terbaik dalam model regresi data berjenis panel (Gujarati, 2012). Uji *Hausman* dilakukan dengan aplikasi *Eviews*, sama seperti uji *Chow*. Berikut ini adalah hipotesis yang diajukan pada uji *Hausman*:

H_0 : REM

H_1 : FEM

Apabila H_0 tertolak maka *P-value* lebih kecil daripada nilai α . Selanjutnya jika H_0 diterima apabila *P-value* lebih besar daripada nilai α . Nilai α yang dipilih yaitu 5%.

c) Uji *Lagrange Multiplier*

Model *Random Effect* dan *Common Effect* dipilih dengan menggunakan model estimasi terbaik ditentukan dengan menggunakan uji *Lagrange Multiplier*. Derajat kebebasan untuk uji LM setara dengan jumlah variabel independen, dan memiliki distribusi *chi-square*. Berikut ini adalah hipotesis untuk uji LM:

H_0 : CEM

H_1 : REM

Menolak H_0 jika nilai LM statistik lebih dari *chi-square* dengan α sama dengan 0,05, yang artinya model yang sesuai adalah Random Effect.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan dengan nilai Jarque-Bera sebesar $0.790671 > \alpha 5\% (0.05)$ sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini yang berjudul Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Retribusi Daerah Terhadap Inflasi di Pulau Jawa terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

	LOGDBH_X1	LOGDAU_X2	LOGDAK_X3	LOGRETRIBUSI_X4
LOGDBH_X1	1.000000	0.748610	0.857089	0.427415
LOGDAU_X2	0.748610	1.000000	0.793090	0.778229
LOGDAK_X3	0.857089	0.793090	1.000000	0.442904
LOGRETRIBUSI_X4	0.427415	0.778229	0.442904	1.000000

Dari hasil pengujian multikolinearitas tersebut menandakan bahwa tidak adanya korelasi antara ketiga variabel independen dikarenakan hasil koefisien antar variabel dibawah 0,9 (Ghozali, 2013) sehingga tidak terdapat permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Varriable	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob.
C	8.505465	6.783966	1.253760	0.2215
LOGDBH_X1	0.233362	0.168845	1.382108	0.1792
LOGDAU_X2	-0.446837	0.527663	-0.846823	0.4051
LOGDAK_X3	-0.265069	0.278484	-0.951830	0.3503
LOGRETRIBUSI_X4	0.250215	0.247858	1.00951	0.3224

Berdasarkan data uji heterokedastisitas tersebut disimpulkan jika nominal probabilitas ketiga variabel independen (LOGDBH_X1, LOGDAU_X2, LOGDAK_X3, LOGRETRIBUSI_X4) memiliki nilai yang melebihi signifikansi $\alpha=0,05$. Maka dari itu, dapat diterima jika hipotesis H_0 terkait dengan ketiadaan heteroskedastisitas dalam variabel tersebut.

Uji Kesesuaian Model

Uji Chow

Tabel 5. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.91673	(4,21)	0.0059
Cross-section Chi-square	19.826778	4	0.0005

Dari hasil uji Chow yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa Probability Chi-square adalah 0,0005, yang secara signifikan lebih kecil daripada tingkat signifikansi alpha sebesar 5% ($0,0005 < 0,05$). Sebagai akibatnya, H_0 ditolak, mengindikasikan bahwa model paling baik untuk diaplikasikan dalam penelitian adalah FEM.

Uji Hausman

Tabel 6. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f.	Prob
Cross-section random	19.666922	4	0.0006

Melalui analisis Uji Hausman, tujuannya yaitu digunakan dalam memilih model yang paling optimal diantara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Dengan mempertimbangkan nominal Probabilitas yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi alpha ($0.0006 < 0.05$), dapat dikatakan jika model paling baik yaitu *Fixed Effect Model*.

Analisis Data Panel

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Uji Parsial (Uji t)

Varriable	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob.
C	628.985400	236.546100	2.659039	0.0147
LOGDBH_X1	-2.649111	1.145464	-2.312697	0.0310
LOGDAU_X2	-15.309890	7.504840	-2.040003	0.0541
LOGDAK_X3	-4.822891	0.916665	-5.261345	0.0000
LOGRETRIBUSI_X4	0.880405	0.581877	1.65528	0.1127

- Hasil pengujian untuk variabel X_1 dimana probabilitas (t statistik) sebesar 0.0310 sedangkan pada taraf signifikan 0,1. Oleh karena itu $0.0310 < 0.010$ maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan JawaTimur
- Hasil pengujian untuk variabel X_2 dimana probabilitas (t statistik) sebesar 0.0541 sedangkan pada taraf signifikan 0,1. Oleh karena itu $0.0541 < 0,1$ maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan JawaTimur

- c. Hasil pengujian untuk variabel X_3 dimana probabilitas (t statistik) sebesar 0.0000 sedangkan pada taraf signifikan 0,1. Oleh karena itu $0.0000 < 0,1$ maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur
- d. Hasil pengujian untuk variabel X_4 dimana probabilitas (t statistik) sebesar 0.1127 sedangkan pada taraf signifikan 0,1. Oleh karena itu $0.1127 > 0,1$ maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)

F-statistic	4.049427
Prob(F-statistic)	0.004763

Uji simultan atau uji F yang dilakukan untuk memberikan gambaran nilai signifikansi secara keseluruhan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui penggunaan model regresi *Fixed Effect Model*, prob(F-statistic) mempunyai nilai yaitu 0.004763 yang mana $<$ dari tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$ (5%). Oleh karena itu dapat dikatakan keempat variabel bebas variabel dependen Inflasi secara signifikan.

Uji Adjusted R-Square (R^2)

Tabel 9. Uji *Adjusted R-Square* (R^2)

Adjusted R-square	0.456882
-------------------	----------

Hasil perolehan nilai *R-square* dari pengolahan statistik adalah 0.456882, nilai *R-square* yang mendekati satu akan dikatakan semakin baik. Merujuk kepada tabel *R-Square*, DBH, DAU, DAK, dan Retribusi memengaruhi Inflasi pada di Pulau Jawa pada tahun 2018-2023 sebesar 45,68% dan sisanya dideskripsikan dengan variabel lainnya di luar model empiris penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dana Bagi Hasil di Provinsi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi karena nominal probabilitas (t statistik) sebesar 0.0310 dimana lebih kecil dari alpha 0,1 atau 10%. Dana Bagi Hasil mempengaruhi tingkat Inflasi. Inflasi dan Dana Bagi Hasil sering memiliki keterkaitan satu sama lain. Pemberian Dana Bagi Hasil pemerintah pusat terhadap daerah merupakan salah satu bagian dari kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap daerah atas pelimpahan kekuasaan serta pendelegasian pendapatan. Pemberian Dana Bagi Hasil ini tentunya dapat menimbulkan peredaran uang (JUB) pada masyarakat meningkat. Besaran transfer pendapatan ini tergantung dari kemampuan suatu daerah atas pengelolaan Sumber Daya yang ada dapat dimaksimalkan atau tidak. Ketika suatu daerah dapat memaksimalkan transfer pendapatan DBH terhadap peluang ketersediaan sumber daya yang ada dapat

memberikan penilaian atau tolak ukur pemerintah pusat untuk menaikkan transfer pendapatan DBH kepada pemda pada penganggaran berikutnya, begitu sebaliknya.

Dana Alokasi Umum memiliki hubungan terhadap tingkat Inflasi. Pemberian DAU pempus terhadap pemda tentunya dapat menimbulkan tingkat peredaran uang (JUB) yang ada pada masyarakat meningkat. Tujuan pemberian Dana Alokasi Umum adalah untuk menurunkan kesenjangan keuangan dan pelayanan publik antar daerah. Besar sedikitnya pemberian DAU dilihat berdasarkan celah fiskal suatu wilayah. Celah fiskal merupakan perbedaan diantara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal, semakin tingginya kebutuhan fiskal di suatu daerah dan tidak disertai dengan kemampuan kapasitas fiskal maka semakin tinggi pemberian DAU terhadap daerah tersebut, begitu pula sebaliknya. Tinggi atau rendahnya pemberian Dana Alokasi Umum ini dapat memberikan efek terhadap tingkat Inflasi di suatu daerah terutama yang berdampak dari tingkatan peredaran uang pada masyarakat. berdasarkan data yang diolah diatas bahwasanya Dana Alokasi Umum di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi karena nominal probabilitas (t statistik) sebesar 0.0541 dimana lebih kecil daripada alpha 0,1 atau 10%.

Dana Alokasi Khusus sebesar 0.0000 dimana lebih kecil dari alpha 0,1 atau 10%. Oleh karena itu secara statistik dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap tingkat Inflasi di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Dana Alokasi Khusus memiliki hubungan terhadap tingkat Inflasi. Pemberian Dana Alokasi Khusus pemerintah pusat terhadap daerah tentunya dapat menimbulkan tingkatan peredaran uang pada masyarakat semakin tinggi. Tujuan pemberian Dana Alokasi Khusus ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik khusus di suatu daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Besar sedikitnya pemberian Dana Alokasi Umum dilihat dari kebutuhan Pembangunan dan efek yang ditimbulkan setelah Pembangunan. Semakin tinggi kebutuhan Pembangunan di suatu daerah semakin tinggi pula Dana Alokasi Khusus yang diberikan. hal ini dibuktikan berdasarkan data realisasi transfer anggaran pemerintah daerah terhadap Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur pada kurun waktu 2019-2023 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat inflasi dimana dari data yang diolah nilai probabilitas (t statistik).

Berdasarkan data yang diolah diatas bahwasanya retribusi daerah di Provinsi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi karena nilai probabilitas (t statistik) sebesar 0.1127 dimana lebih besar dari alpha 0,1 atau 10%. Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Apprirachman et al., 2017). Retribusi Daerah merupakan suatu pembayaran yang berasal dari masyarakat ke pemerintah atas balas jasa yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap pelayanan tertentu. Semakin besar pemanfaatan masyarakat atas pelayanan tertentu yang disediakan pemerintah daerah akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, hal ini berlaku sebaliknya. Hal ini tentunya akan mempengaruhi naik atau turunnya tingkat inflasi di suatu daerah.

REFERENSI

Amin, N. (2016). *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi*. 1–6.

- Appirachman, R., Suwardi, D., & Ilman, A. H. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi di Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 53–61. <https://doi.org/10.37673/jebi.v2i2.4>
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 149–163. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Pogram IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Erlangga.
- Khamdana, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia, 2008 – 2012. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(1), 23–38. <https://doi.org/10.33105/itrev.v1i1.59>
- Kurniawan, D. (2018). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006-2015*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*.
- Putri, P. N. (2009). *Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Kebijakan Fiskal Regional Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta (Periode 1990-2007)*. Universitas atma Jaya Yogyakarta.
- Rakanita, A. M., & Sasana, H. (2011). *Kajian Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. 2006, 60–72.
- Taqwa, D. F., Priyono, H. T., & Santosa, H. S. (2016). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 (The Influence of Fiscal Decentralization on Growth and Disparity in East Java Province at 2010-2014)*. 2014.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (Edisi Keli). UPP STIM YKPN.
- Zulkipli. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal E-KOMBIS*, III(1).